DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TATA TERTIB

2019

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.1, BD 2019/NO.1, 52 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

ABSTRAK

- Peraturan DPRD Kabupaten Purbalingga No.04 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali agar poin ke empat Pancasila dapat terwujud melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang mencerminkan niali-nilai demokrasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2004; UU No.09 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.01 Tahun 2015; UU No.07 Tahun 2017; PP No.24 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.03 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.11 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.34 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA KAB.PURBALINGGA No.01 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Diatur tentang Ketentuan umum; Fungsi, tugas dan wewenang DPRD; Keanggotan DPRD dan sumpah janji; Alat kelengkapan DPRD; Rencana kerja DPRD; Pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD; Pokok pikiran DPRD; Persidangan dan Rapat DPRD; Pengambilan keputusan; Pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu dan pemberhentian; Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat yang dapat ditindak lanjuti dengan rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, atau rapat kerja alat kelengkapan

DPRD dengan mitra kerja; Kode etik; Konsultasi DPRD; Perjalanan dinas dan/atau kunjungan kerja seminar, bintek, workshop, tematik dan pelatihan; Sekretariat DPRD; Ketentuan lain-lain; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 133 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19
 Februari 2019.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: peraturan DPRD
 Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD
 Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: hlm.